



The Dynamics of Power in the Political Discourse of Najwa Shihab and Prabowo Subianto on the Police Bill (RUU Polri)

Ruly Aprilia Radianti¹, Rosita Sofyaningrum^{*2}

^{*} rositasofyaningrum@gmail.com

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ma'arif Nahdaltul Ulama Kebumen, Kebumen, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the dynamics of power in political discourse through a critical discourse analysis of the dialogue between Najwa Shihab and Prabowo Subianto concerning the Draft Law on the Indonesian National Police. The research aims to reveal how power relations between media and the state are constructed, negotiated, and maintained through language. Employing a qualitative approach, this study applies Norman Fairclough's three dimensional model of Critical Discourse Analysis, encompassing textual analysis, discursive practice, and social practice. The data consist of fifteen selected excerpts from the televised dialogue, which are analyzed as complete discursive events. The findings indicate that at the textual level, Najwa Shihab employs evaluative diction, oppositional structures, and critical interrogative forms to problematize the draft law and challenge state authority, while Prabowo Subianto utilizes declarative, normative, and imperative expressions to assert legitimacy and institutional power. At the level of discursive practice, the media exercises discursive control by framing issues around public concerns and directing the flow of interaction, whereas the state adopts defensive and justificatory strategies to normalize policy decisions and limit criticism. At the level of social practice, the discourse reflects broader democratic tensions in Indonesia related to transparency, public participation, and the centralization of state power. The study concludes that the dialogue functions not merely as an informative interview but as a political arena where media and state actors compete discursively to shape meaning, legitimacy, and public opinion.

Keywords: critical discourse analysis; media and power; political discourse; state authority

PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi, media massa memainkan peran strategis dalam membentuk, menyebarkan, dan menegosiasikan makna kekuasaan dalam ruang publik. Media berfungsi sebagai penyampai informasi sekaligus sebagai arena diskursif tempat relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil diproduksi serta dipertahankan melalui bahasa (Sakina & Hendrik, 2025). Dalam konteks ini, program dialog politik di televisi dan media massa online menjadi ruang penting bagi pertarungan wacana, terutama ketika isu yang dibahas menyangkut kebijakan sensitif dan berdampak luas terhadap kehidupan demokrasi serta relasi kerja, di mana media kerap mereproduksi dominasi negara dan korporasi melalui praktik wacana yang memarginalkan suara kelompok rentan (Octaviana, 2024). Bahasa dalam wacana media tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai alat hegemoni yang membentuk realitas sosial, ideologi dominan, dan konsensus publik melalui representasi simbolik dalam teks media (Suhardi & Salamah, 2025).

Salah satu isu yang memicu perhatian publik adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Isu ini dinilai kontroversial karena berkaitan dengan perluasan kewenangan institusi kepolisian yang berpotensi memengaruhi kebebasan sipil dan mekanisme pengawasan demokratis. Dialog antara Najwa Shihab dan Presiden Prabowo Subianto dalam program *Mata Najwa* menjadi contoh konkret praktik komunikasi politik di media yang sarat kepentingan ideologis. Bahasa yang digunakan dalam dialog tersebut tidak bersifat netral, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mempertahankan otoritas, membangun legitimasi, serta merespons tekanan publik (Foucault, 1980).

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa analisis wacana kritis, khususnya dengan pendekatan Norman Fairclough, efektif digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan dalam komunikasi politik. Penelitian Anggraini dan Fadillah (2021) menunjukkan bahwa pidato presiden merepresentasikan kekuasaan melalui strategi representasional yang terstruktur, sementara Widodo dan Fitriani (2025) menemukan bahwa wawancara presiden di talk show politik cenderung menguatkan hegemoni pemerintah melalui pengelolaan narasi yang selektif. Studi-studi ini menegaskan bahwa bahasa berperan penting dalam membentuk legitimasi kekuasaan di ruang media.

Penelitian lain berfokus pada format talk show dan wawancara televisi. Wijaya (2022) serta Ahmad (2025) mengungkap bahwa tokoh politik dalam acara bincang-bincang televisi menggunakan strategi framing, pengalihan isu, dan kontrol narasi untuk memengaruhi opini publik. Maulana (2020) menambahkan bahwa dominasi topik dan interupsi menjadi strategi utama dalam mempertahankan posisi kekuasaan dalam diskusi politik di televisi. Meski demikian, sebagian besar penelitian tersebut menganalisis interaksi multipihak atau format diskusi panel, bukan wawancara eksklusif satu lawan satu.

Sementara itu, kajian Sari dan Hermina (2023), serta Rahmi dan Yusuf (2024), memperluas perspektif dengan meneliti wacana kekuasaan dalam media daring dan teks opini. Temuan mereka menunjukkan bahwa diksi dan struktur narasi media berperan dalam menguatkan atau melemahkan justifikasi kebijakan pemerintah. Di luar ranah politik, Sofyaningrum dan Setiawan (2024) membuktikan bahwa relasi kekuasaan juga hadir dalam media sosial melalui narasi visual dan bahasa promosi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam praktik wacana kekuasaan dalam interaksi dialogis audiovisual yang melibatkan konfrontasi langsung antara jurnalis dan pemegang kekuasaan negara.

Berdasarkan telaah terhadap studi-studi terdahulu, tampak adanya kesenjangan penelitian pada aspek objek, format media, dan konteks interaksi. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pidato resmi, teks tertulis, berita daring, atau diskusi panel, sehingga dinamika kekuasaan dalam wawancara televisi satu lawan satu belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengaitkan isu kebijakan kontroversial seperti RUU Polri dengan strategi diskursif tokoh negara dalam media populer masih sangat terbatas.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya analisis yang memadukan dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial secara simultan dalam konteks media audiovisual. Padahal, pendekatan tiga dimensi Fairclough memungkinkan pengungkapan relasi kuasa yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui bahasa verbal, tetapi juga melalui konteks produksi dan konsumsi wacana (Fairclough, 2015).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana dinamika kekuasaan dibangun dan dinegosiasikan melalui bahasa dalam dialog antara Najwa Shihab dan Presiden Prabowo Subianto terkait RUU Polri di program *Mata Najwa*. Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana politik tersebut menggunakan model tiga dimensi analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mengungkap relasi kuasa antara media dan negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan objek kajian berupa wawancara televisi satu lawan satu yang bersifat aktual dan kontroversial, serta pada upaya memadukan analisis bahasa, strategi komunikasi politik, dan konteks sosial-politik dalam medium audiovisual yang belum banyak dikaji secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna bahasa, relasi kuasa, serta ideologi yang tersembunyi di balik praktik wacana politik secara mendalam dan kontekstual. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena kebahasaan sebagaimana adanya, sedangkan sifat kritis diarahkan untuk mengungkap relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis yang bekerja dalam teks wacana. Kerangka analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang menempatkan bahasa sebagai praktik sosial.

Subjek dalam penelitian ini adalah tuturan para partisipan yang terlibat dalam wawancara antara jurnalis Najwa Shihab dan Presiden Prabowo Subianto yang membahas Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, melainkan menentukan subjek penelitian secara purposif berdasarkan relevansi data dengan tujuan penelitian. Objek penelitian berupa teks wacana yang dihasilkan dari interaksi wawancara tersebut, baik dalam bentuk tuturan verbal maupun unsur nonverbal yang menyertainya, seperti intonasi dan penekanan ujaran, yang dinilai merepresentasikan dinamika kekuasaan dalam komunikasi politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan teknik simak-catat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer berupa video wawancara yang diunggah pada kanal YouTube Narasi, sedangkan teknik simak-catat dilakukan dengan cara menyimak tayangan secara berulang, mentranskripsikan tuturan secara cermat, kemudian mencatat bagian-bagian wacana yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, sekaligus penafsir data. Untuk membantu ketelitian analisis, peneliti menggunakan panduan analisis yang disusun berdasarkan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap dan bersifat interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dengan mengorganisasi hasil analisis ke dalam uraian deskriptif-analitis sesuai dengan dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan temuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai sarana pembentukan, legitimasi, dan negosiasi kekuasaan dalam wacana RUU Polri. Proses analisis ini dilakukan secara berulang dan reflektif hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan konsisten terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kekuasaan dalam Wacana Politik Dialog Najwa Shihab Dan Prabowo Melalui Model Tiga Dimensi Norman Fairclough

Tabel berikut menyajikan analisis seluruh 15 data wacana secara utuh dan konsisten berdasarkan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Setiap kutipan dianalisis sebagai satu peristiwa wacana yang merepresentasikan dinamika kekuasaan dalam komunikasi politik di media.

No	Kutipan Dialog	Penutur	Dimensi Teks (Linguistik)	Dimensi Praktik Diskursif	Dimensi Praktik Sosial
1	“Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak.”	NS	Diksi <i>kekhawatiran</i> merepresentasikan sikap waspada dan kritik awal. Sapaan <i>Pak</i> menunjukkan kesantunan sekaligus posisi subordinatif secara linguistik.	Najwa membuka wacana dengan framing berbasis suara masyarakat sipil, memosisikan diri sebagai mediator publik.	Mencerminkan relasi kuasa negara–masyarakat dalam demokrasi, di mana suara publik berupaya menekan otoritas negara.
2	“Proses pembentukan undang-undang kita makin jauh dari rakyat.”	NS	Metafora <i>makin jauh</i> menandakan jarak simbolik antara negara dan rakyat.	Najwa membangun narasi delegitimasi proses legislasi melalui kritik langsung.	Menunjukkan problem struktural demokrasi prosedural yang elitis.
3	“Tidak ada partisipasi publik yang bermakna.”	NS	Frasa evaluatif <i>tidak bermakna</i> bersifat menilai dan menghakimi proses politik.	Wacana ini diproduksi untuk menekan legitimasi pemerintah.	Menggambarkan marginalisasi publik dalam kebijakan strategis negara.
4	“Wewenang aparat negara diperbesar, sementara warga negara diperkecil perannya.”	NS	Struktur oposisi <i>diperbesar–diperkecil</i> mempertegas ketimpangan kuasa.	Najwa memanfaatkan dikotomi bahasa untuk mempertajam konflik wacana.	Mengindikasikan kecenderungan negara menuju sentralisasi kekuasaan.
5	“Kewenangan kepolisian akan ditambah, tetapi pengawasannya minim.”	NS	Konjungsi <i>tetapi</i> menunjukkan pertentangan logis dan kritik kebijakan.	Produksi wacana diarahkan untuk menuntut akuntabilitas.	Menunjukkan lemahnya mekanisme checks and balances institusional.
6	“Dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat.”	NS	Penggunaan istilah Inggris <i>abuse of power</i> memberi bobot global dan hukum.	Najwa mengaitkan wacana dengan memori kolektif pelanggaran aparat.	Menggambarkan sejarah kekuasaan represif negara.
7	“Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru pengawasannya yang diperkuat?”	NS	Kalimat interogatif alternatif membatasi ruang jawaban.	Strategi kontrol jurnalis terhadap narasi narasumber.	Media menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
8	“Saya percaya dengan sistem.”	PS	Kalimat deklaratif sederhana dan normatif.	Prabowo menutup kritik dengan legitimasi sistem abstrak.	Negara mempertahankan status quo institusional.
9	“Undang-undang dibahas oleh	PS	Struktur pasif menekankan	Wacana diproduksi untuk	Demokrasi direduksi pada

	partai politik yang dipilih oleh rakyat.”		legitimasi prosedural.	meredam kritik publik.	representasi elektoral formal.
10	“Masalahnya, prosesnya tidak transparan dan drafnya tidak terbuka.”	NS	Diksi <i>masalahnya</i> menandai konfrontasi langsung.	Najwa merebut kembali kendali diskusi.	Menyoroti defisit transparansi dalam tata kelola negara.
11	“Ini sudah berjalan belasan tahun.”	PS	Penanda waktu digunakan sebagai normalisasi.	Strategi naturalisasi kebijakan lama.	Kekuasaan direproduksi melalui legitimasi historis.
12	“Rakyat tidak mendapatkan akses.”	NS	Kalimat deklaratif singkat dan tegas.	Penguatan posisi masyarakat sebagai pihak terpinggirkan.	Ketimpangan akses informasi dalam struktur negara.
13	“Jangan ngarang.”	PS	Kalimat imperatif bernada keras.	Upaya simbolik mendominasi dan mendisiplinkan lawan bicara.	Kekuasaan negara tampil secara represif dalam bahasa.
14	“Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak?”	NS	Interogatif langsung dengan kesantunan formal.	Pengulangan pertanyaan sebagai tekanan diskursif.	Media menuntut akuntabilitas kebijakan keamanan.
15	“Polisi harus diberi wewenang yang cukup.”	PS	Modalitas <i>harus</i> menunjukkan otoritas normatif.	Prabowo menegaskan posisi kekuasaan secara eksplisit.	Legitimasi negara atas ekspansi aparat keamanan.

Pada dimensi teks, dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo memperlihatkan penggunaan bahasa yang sarat makna ideologis dan relasi kuasa. Najwa secara konsisten memakai diksi evaluatif dan kritis seperti *kekhawatiran*, *makin jauh*, *tidak bermakna*, *minim*, dan *tidak transparan* untuk membangun wacana problematisasi terhadap RUU Polri, sebagaimana praktik bahasa kritis yang menantang wacana dominan dalam ruang publik (Sukrin & Muhlisina, 2025). Struktur oposisi linguistik seperti *diperbesar–diperkecil* serta penggunaan konjungsi pertentangan *tetapi* menegaskan ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga, yang pada level tekstual berfungsi sebagai strategi ideologis dalam pembingkai realitas dan legitimasi kekuasaan (Utami, 2025; Latifah et al., 2026). Bentuk kalimat interogatif, baik alternatif maupun langsung, digunakan Najwa untuk membatasi ruang jawaban dan menekan narasumber secara diskursif, meskipun tetap dibungkus dalam kesantunan formal melalui sapaan *Pak*, yang menunjukkan strategi mitigatif dan negosiasi kuasa dalam interaksi institusional (Barus & Isra, 2025). Sebaliknya, Prabowo menggunakan kalimat deklaratif normatif dengan modalitas kuat seperti *harus* serta pernyataan singkat seperti *Saya percaya dengan sistem* yang mencerminkan bahasa otoritatif dan legitimatif khas kekuasaan negara. Bahkan, ungkapan imperatif *Jangan ngarang* menunjukkan pergeseran praktik bahasa menuju bentuk yang lebih dominatif dan represif, menegaskan fungsi bahasa sebagai instrumen peneguhan dan reproduksi kekuasaan dalam wacana politik, sejalan dengan temuan bahwa relasi kuasa kerap dibangun melalui modalitas, imperatif, dan evaluasi bahasa dalam teks media dan film (Sukrin & Muhlisina, 2025; Latifah et al., 2026; Damayanti et al., 2025).

Pada dimensi praktik diskursif, dialog ini menunjukkan proses produksi dan konsumsi

wacana yang bersifat konfrontatif tetapi terkontrol, di mana Najwa Shihab memproduksi wacana melalui framing berbasis suara masyarakat sipil dan memosisikan diri sebagai mediator publik sekaligus pengontrol arah diskusi. Peran tersebut sejalan dengan fungsi media dalam membentuk dan mengarahkan diskursus politik di ruang publik serta menjaga kredibilitas informasi di tengah tekanan politik dan disrupsi digital (Pasah et al., 2025; Suardi, 2025). Strategi pengulangan pertanyaan, kritik berlapis, dan penarikan kembali isu transparansi merefleksikan upaya media mempertahankan dominasi narasi kritis dan membangun kepercayaan publik melalui praktik jurnalisme yang akuntabel, sekaligus menegaskan bahwa produksi wacana media merupakan ruang negosiasi makna yang sarat relasi kuasa dan konstruksi simbolik (Qathrunnada et al., 2025; Tasrif, 2025). Sebaliknya, Prabowo merespons dengan strategi defensif-justifikatif melalui rujukan pada legitimasi prosedural, sistem politik representatif, dan normalisasi kebijakan dengan penanda waktu (“sudah berjalan belasan tahun”), yang mencerminkan praktik diskursif negara dalam meredam kritik dan meneguhkan stabilitas makna melalui komunikasi politik berorientasi legitimasi dan pengelolaan opini publik (Purnawati et al., 2025). Pola ini sejalan dengan temuan bahwa aktor dominan cenderung mereproduksi hegemoni makna melalui struktur wacana dan strategi komunikasi yang membatasi visibilitas narasi tandingan, baik di media arus utama maupun ruang digital (Wafiroh & Asropah, 2025; Tasrif, 2025), sehingga interaksi tersebut menegaskan bahwa praktik diskursif merupakan arena perebutan legitimasi wacana antara aktor media dan aktor negara.

Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, keseluruhan dialog merefleksikan relasi kekuasaan yang timpang namun dinamis antara media, negara, dan masyarakat dalam konteks demokrasi Indonesia pascareformasi. Wacana kritis yang dibangun Najwa mencerminkan kegelisahan masyarakat sipil terhadap rendahnya partisipasi publik, lemahnya transparansi, serta terbatasnya mekanisme pengawasan kekuasaan negara, khususnya terkait perluasan kewenangan institusi kepolisian tanpa kontrol yang memadai, yang berpotensi mereproduksi praktik kekuasaan represif dan sentralistik (Artha, 2026). Kritik semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan partisipasi masyarakat sipil merupakan elemen kunci dalam pengawasan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis (Wonlele et al., 2026). Selain itu, dinamika relasi kuasa negara–masyarakat juga tampak dalam praktik kebijakan sektoral, seperti konflik agraria, yang menunjukkan bagaimana negara sering memosisikan diri sebagai otoritas dominan sementara masyarakat berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga memerlukan mekanisme mediasi dan pengawasan lintas aktor untuk mencegah konflik berlarut (Darman, 2026). Sebaliknya, wacana Prabowo merepresentasikan posisi negara yang berupaya mempertahankan status quo melalui legitimasi hukum, rujukan historis, dan otoritas normatif sebagai strategi normalisasi relasi kuasa antara negara dan warga. Pola ini menunjukkan bagaimana kebijakan hukum kerap dibingkai sebagai keniscayaan demokratis, meskipun dalam praktiknya sarat tarik-menarik kepentingan kekuasaan yang berpotensi mendistorsi nilai keadilan substantif dan membatasi ruang partisipasi publik (Lorenza & Mulyadi, 2025). Dengan demikian, dialog ini tidak sekadar merepresentasikan pertukaran pendapat individual, melainkan menjadi cerminan praktik sosial yang lebih luas, di mana media menjalankan fungsi kontrol sosial dan artikulasi kepentingan publik, sementara negara berupaya mempertahankan hegemoni melalui bahasa, kebijakan, dan legitimasi institusional (Artha, 2026; Wonlele et al., 2026; Darman, 2026).

Bentuk-Bentuk Wacana Politik dalam Dialog Najwa Shihab dan Prabowo tentang RUU Polri sebagai Refleksi Relasi Kekuasaan antara Media dan Negara

Dialog antara Najwa Shihab sebagai representasi media dan Prabowo Subianto sebagai representasi negara dalam pembahasan RUU Polri tidak sekadar merupakan percakapan informatif, melainkan arena pertarungan wacana politik. Dalam perspektif Analisis Wacana

Kritis Norman Fairclough, wacana tersebut merefleksikan relasi kuasa yang dinegosiasikan, dipertahankan, dan dipertanyakan melalui bahasa.

Wacana Interogatif Kritis sebagai Representasi Kekuasaan Media

Salah satu bentuk wacana politik yang menonjol dalam dialog tersebut adalah wacana interogatif kritis, yang diwujudkan melalui pertanyaan-pertanyaan Najwa Shihab yang bersifat tajam, mendesak, dan menuntut kejelasan sikap negara. Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor politik simbolik yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan melalui praktik bahasa dan representasi wacana (Ngatma'in & Sohnui, 2026; Fowler, 1991). Najwa menggunakan pertanyaan langsung, pertanyaan lanjutan (*follow-up*), serta pertanyaan yang dibangun dari asumsi publik untuk memposisikan negara sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan di hadapan masyarakat, sebuah praktik yang menegaskan peran jurnalis sebagai representasi kepentingan publik dan penekan akuntabilitas kekuasaan (Miswari et al., 2026). Dari perspektif analisis wacana kritis, strategi interogatif tersebut beroperasi pada dimensi praktik diskursus dengan mengontrol alur interaksi dan produksi makna, serta pada dimensi sosiokultural dengan merefleksikan kegelisahan publik terhadap relasi kuasa negara dalam konteks kebijakan strategis (Fairclough, 1995; Putra, 2026). Dengan demikian, wacana interogatif kritis tidak hanya merefleksikan kekuasaan media dalam membingkai isu dan mengarahkan agenda publik, tetapi juga menegaskan fungsi media sebagai *watchdog* demokrasi yang bekerja melalui mekanisme linguistik dan ideologis (Ngatma'in & Sohnui, 2026; Fowler, 1991). Namun demikian, kekuasaan media bersifat diskursif, bukan struktural, karena pengaruhnya bekerja melalui bahasa dan konstruksi makna, bukan melalui kewenangan formal dalam pengambilan keputusan negara, meskipun tetap berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana prinsip pengawasan dalam tata kelola yang baik (*good governance*) (Alfredo et al., 2026)..

Wacana Defensif-Justifikatif sebagai Strategi Kekuasaan Negara

Sebagai respons terhadap tekanan media, Prabowo memproduksi wacana defensif dan justifikatif sebagai upaya mempertahankan legitimasi negara atas RUU Polri. Wacana ini diwujudkan melalui penekanan pada stabilitas nasional, penggunaan istilah normatif seperti *kepentingan bangsa* dan *keamanan negara*, serta strategi pengalihan isu dari substansi kritik menuju urgensi kebijakan, yang berfungsi mereduksi potensi delegitimasi kebijakan di ruang publik (Fairclough, 1995). Melalui strategi diskursif tersebut, negara menampilkan diri sebagai aktor rasional, pemegang otoritas sah, dan pihak yang memiliki pengetahuan lebih luas dibandingkan publik, sehingga relasi kuasa antara negara dan masyarakat dikonstruksi secara hierarkis dan asimetris (Fowler, 1991). Pola ini sejalan dengan temuan Rumaf et al. (2025) yang menunjukkan bahwa dalam teks-teks kepresidenan Prabowo, legitimasi kekuasaan dibangun melalui kosakata normatif, modalitas kewajiban, serta strategi evaluatif yang merepresentasikan negara sebagai pelindung kepentingan kolektif. Lebih jauh, strategi legitimasi negara melalui narasi krisis, stabilitas, dan urgensi kebijakan juga dapat dipahami sebagai praktik *governmentality*, yakni mekanisme kekuasaan yang menormalisasi kebijakan melalui produksi pengetahuan dan rezim kebenaran tertentu, sehingga membatasi ruang kritik dan resistensi publik (Hajad et al., 2025). Strategi semacam ini berimplikasi pada melemahnya partisipasi publik yang bersifat substantif, karena masyarakat lebih sering diposisikan sebagai penerima kebijakan daripada subjek kritis dalam proses pengambilan keputusan (Putri, 2025). Dengan demikian, wacana defensif tersebut mencerminkan kekuasaan simbolik negara, yakni kemampuan untuk menentukan apa yang dianggap penting, mendesak, dan sah dalam ruang publik, sekaligus menormalkan kebijakan melalui bahasa yang tampak objektif dan rasional (Rumaf et al., 2025; Fairclough, 1995; Hajad et al., 2025).

Wacana Legitimasi dan Delegitimasi

Dialog tersebut memuat wacana legitimasi dan delegitimasi yang saling berhadapan antara media dan negara. Media berupaya mendelegitimasi RUU Polri dengan menonjolkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, kekhawatiran publik terhadap penguatan institusi represif, serta minimnya transparansi dalam proses legislasi sebagai strategi diskursif untuk membuka ruang kritik dan resistensi publik terhadap kebijakan negara (Fairclough, 1995). Sebaliknya, negara melakukan legitimasi melalui penekanan pada legalitas prosedural, otoritas negara dalam menjaga keamanan, serta narasi ancaman terhadap stabilitas nasional sebagai dasar pembenaran kebijakan. Pertarungan diskursif ini menunjukkan bahwa wacana politik tidak hanya menjadi arena pertukaran argumen rasional, tetapi juga medan kontestasi simbolik yang bersifat performatif untuk merebut kepercayaan publik dan mendefinisikan kebenaran sosial melalui bahasa. Pola tersebut sejalan dengan temuan Apriawan Lalu (2025) yang menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam ruang publik, termasuk ruang digital, dikonstruksi melalui praktik performatif wacana sebagai bentuk negosiasi kuasa yang dinamis. Temuan ini juga diperkuat oleh Pangemanan (2024) yang menegaskan bahwa strategi retorik populis bekerja melalui polarisasi, delegitimasi lawan, dan simbolisasi krisis guna membangun legitimasi aktor politik di hadapan publik. Selain itu, mekanisme legitimasi simbolik dalam praktik politik juga tampak dalam konteks elektoral lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Ndolu, Muskanan, dan Baso (2025) bahwa legitimasi politik dibangun melalui kombinasi strategi komunikasi modern, modal sosial, dan legitimasi kultural sebagai sarana memperkuat posisi aktor politik di mata masyarakat. Lebih jauh, praktik legitimasi simbolik tersebut berkaitan erat dengan konsep kekerasan simbolik yang bekerja secara laten melalui bahasa dan representasi dalam ruang publik, baik konvensional maupun digital (Pramestisari, 2025).

Wacana Hegemonik dan Negosiasi Kekuasaan

Dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough, dialog ini mencerminkan proses negosiasi hegemoni antara negara dan media dalam memperebutkan definisi makna kebijakan publik. Negara berupaya mempertahankan wacana dominan yang memposisikan RUU Polri sebagai kebutuhan objektif negara demi stabilitas dan keamanan nasional, sementara media berusaha membuka ruang wacana alternatif dengan membingkai kebijakan tersebut sebagai persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik ini menunjukkan bahwa produksi wacana politik tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan pertarungan ideologis dalam ruang publik yang melibatkan relasi kuasa dan kepentingan simbolik (Fairclough, 1995). Relasi kekuasaan antara media dan negara dalam konteks ini tidak sepenuhnya seimbang, melainkan dinamis dan saling memengaruhi, karena media memiliki kapasitas membentuk opini publik melalui proses framing, seleksi isu, dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan, sementara negara tetap memegang kekuasaan struktural dalam penetapan serta legitimasi kebijakan (Putri & Chasana, 2025). Dengan demikian, wacana yang muncul bukan merupakan hasil dominasi tunggal, melainkan produk tawar-menawar ideologis yang terus berlangsung dalam ruang publik. Pola negosiasi ini sejalan dengan konsep hegemoni Gramsci, sebagaimana ditunjukkan oleh Jakaria, Anggreini, dan Harahap (2025), bahwa hegemoni dibangun melalui proses persetujuan dan negosiasi ideologis yang melibatkan berbagai aktor sosial, bukan semata-mata melalui pemaksaan koersif. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Lestari et al. (2025) yang menunjukkan bahwa ideologi dominan kerap tidak ditolak secara frontal, melainkan dinegosiasikan agar tetap diterima secara sosial melalui penyesuaian makna, nilai, dan representasi. Selain itu, praktik negosiasi makna dalam wacana kebijakan ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme *power-knowledge*, yakni cara negara memproduksi dan menormalisasi kebenaran melalui bahasa kebijakan dan legitimasi institusional, sebagaimana dijelaskan dalam analisis diskursus Foucauldian oleh Sena dan Oktafiani (2026), yang menegaskan bahwa wacana berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dalam membentuk

kesadaran, kepatuhan, dan cara pandang publik terhadap realitas sosial.

Wacana Representasi Publik sebagai Alat Kekuasaan Simbolik

Najwa Shihab secara konsisten menggunakan kata ganti dan frasa yang merepresentasikan suara publik seperti “*masyarakat mempertanyakan*”, “*banyak yang khawatir*”, dan “*publik menilai*”. Strategi ini berfungsi memperkuat posisi media sebagai perpanjangan suara rakyat sekaligus membingkai kritik sebagai aspirasi kolektif, bukan opini personal. Dalam perspektif representasi aktor sosial, praktik tersebut menunjukkan strategi **inklusi** dan **generalisasi** aktor sosial, yakni publik dihadirkan sebagai subjek wacana yang sah dan berwenang untuk menilai kebijakan negara (van Leeuwen, 1996; Ernanda, 2025). Strategi ini sejalan dengan pandangan analisis wacana kritis yang menempatkan media sebagai aktor strategis dalam membangun dan mendistribusikan relasi kuasa melalui produksi makna di ruang publik (Fairclough, 1995), serta sejalan dengan temuan studi framing media yang menunjukkan bahwa penekanan pada reaksi publik merupakan cara media memengaruhi opini dan membingkai legitimasi kebijakan politik (Juidah & Pratiwi, 2025).

Sebaliknya, negara cenderung menggunakan representasi kolektif abstrak seperti “*kita*” dan “*bangsa ini*” untuk mengaburkan posisi aktor pengambil keputusan konkret. Penggunaan strategi **impersonalisasi** dan **abstraksi** ini berfungsi memperluas legitimasi kebijakan sekaligus mereduksi pertanggungjawaban individual, karena keputusan dipresentasikan seolah-olah merupakan kehendak kolektif yang alamiah dan tak terhindarkan (van Leeuwen, 1996). Pola representasi semacam ini selaras dengan temuan Rohmatulloh dan Setiawati (2025) yang menunjukkan bahwa wacana politik cenderung mereduksi tuntutan publik dan mengaburkan persoalan struktural demi menjaga narasi stabilitas kekuasaan. Selain itu, analisis van Dijk menegaskan bahwa strategi inklusivitas semu dalam wacana politik bekerja melalui pengelolaan kognisi sosial publik untuk membangun legitimasi ideologis dan mengarahkan persepsi khalayak (van Dijk, 2008; Dewi et al., 2025). Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan simbolik untuk memperluas legitimasi negara, mengaburkan relasi kuasa dan tanggung jawab aktor spesifik, serta menguatkan otoritas melalui representasi kolektif yang tampak inklusif, namun bersifat hierarkis (Ernanda, 2025).

Bentuk-bentuk wacana politik dalam dialog Najwa Shihab dan Prabowo tentang RUU Polri merefleksikan relasi kekuasaan yang asimetris namun dinegosiasikan antara media dan negara. Media memiliki kekuasaan diskursif untuk mengkritisi, menekan, dan membingkai isu, sementara negara mempertahankan kekuasaan struktural dan simbolik untuk melegitimasi kebijakan. Dialog tersebut menegaskan bahwa bahasa bukan alat netral, melainkan instrumen kekuasaan, di mana media dan negara saling berkompetisi dalam membangun makna, legitimasi, dan pengaruh terhadap opini publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto mengenai RUU Polri merupakan praktik wacana politik yang merefleksikan relasi kekuasaan antara media dan negara. Berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough, ketiga dimensi analisis, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, saling berkaitan dalam membangun makna dan ideologi. Pada dimensi teks, terlihat perbedaan strategi linguistik yang kontras. Najwa Shihab menggunakan diksi evaluatif, struktur oposisi, serta kalimat interogatif kritis untuk memproblematisasi RUU Polri dan menempatkan negara sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan. Sebaliknya, Prabowo Subianto menggunakan kalimat deklaratif normatif, modalitas keharusan, serta ungkapan imperatif untuk menegaskan otoritas dan legitimasi negara.

Pada dimensi praktik diskursif, dialog ini memperlihatkan pertarungan wacana yang berlangsung secara terkontrol. Media berperan aktif dalam memproduksi dan mengarahkan

wacana melalui framing berbasis suara publik, pengulangan pertanyaan, serta pembatasan ruang jawaban narasumber. Praktik ini menunjukkan kekuasaan diskursif media dalam mengontrol alur dialog dan membingkai isu kebijakan. Di sisi lain, negara memproduksi wacana defensif dan justifikatif dengan menekankan legitimasi prosedural, sistem politik representatif, serta stabilitas nasional. Interaksi tersebut menegaskan bahwa produksi dan konsumsi wacana politik tidak bersifat netral, melainkan sarat kepentingan dan posisi kuasa masing masing aktor.

Pada dimensi praktik sosial, keseluruhan dialog merefleksikan kondisi demokrasi Indonesia yang masih menghadapi persoalan transparansi, partisipasi publik, dan kecenderungan penguatan otoritas negara. Bentuk bentuk wacana politik yang muncul, seperti wacana interogatif kritis, legitimasi dan delegitimasi, serta negosiasi hegemoni, menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara media dan negara bersifat asimetris namun dinamis. Media memiliki kekuasaan simbolik untuk membentuk opini publik dan menekan negara melalui bahasa, sementara negara tetap mempertahankan kekuasaan struktural dalam penetapan kebijakan. Namun demikian, temuan penelitian ini terbatas pada satu dialog politik sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh praktik komunikasi politik di media.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menganalisis dialog politik serupa di berbagai media dan isu kebijakan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kekuasaan antara media dan negara. Penelitian lanjutan juga dapat melibatkan analisis resepsi audiens untuk mengetahui bagaimana wacana politik dimaknai dan berdampak pada sikap publik.

Selain itu, penggunaan pendekatan analisis wacana kritis lain, seperti model Van Dijk atau analisis multimodal, dapat memperkaya kajian mengenai representasi kekuasaan tidak hanya melalui bahasa verbal, tetapi juga melalui visual, gestur, dan struktur media. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong media untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan mendorong negara untuk lebih terbuka terhadap kritik publik dalam proses perumusan kebijakan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2025). *Kekuasaan dalam diskursus politik: Analisis diskursus kritis terhadap wawancara politik dalam program "60 Menit"* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada.
- Alfredo, M., Masyita, R., Lubis, V. K., & Zein, A. W. (2026). Konsep dan ruang lingkup good corporate governance. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8258>
- Anggraini, D., & Fadillah, N. (2021). Representasi kekuasaan dalam wacana politik Presiden Joko Widodo: Studi analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(2), 22–34.
- Apriawan Lalu, L. D. (2025). Performativity power relations: A discourse analysis of Regent Sudewo's policies via the Instagram account @wargapati_. *Metafora*, 9(2), 131–153. <https://doi.org/10.26740/metafora.v9n2.p131-153>
- Artha, G. W. (2026). Quo vadis masyarakat sipil: Normalisasi relasi negara dalam imajinasi intelektual Jawa Timur. *Journal Politique*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/politique.2026.6.1.1-20>
- Barus, F., & Isra, M. (2025). Bahasa sebagai cermin relasi kuasa dalam komunikasi antara pekerja dan manajemen di lingkungan Institut Teknologi Sawit Indonesia: Analisis wacana kritis. *Triangulasi: Jurnal Pendidikan Kebahasaan, Kesastraan, dan Pembelajaran*, 5(2), 129–137. <https://doi.org/10.55215/triangulasi.v5i2.28>

- Damayanti, R., Jufri, J., & Mahmudah, M. (2025). Representasi ideologi dan kekuasaan dalam film *Gadis Kretek: Model Norman Fairclough*. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 14(1). <https://doi.org/10.26499/jentera.v14i1.8299>
- Darman, R. (2026). Peran gugus tugas reforma agraria terhadap konflik tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut Kabupaten Agam. *Tunas Agraria*, 9(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v9i1.524>
- Dewi, L. L., Nurjaya, I. G., & Utama, I. D. G. B. (2025). Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk pidato perdana Presiden RI 2024. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 15(3). <https://doi.org/10.23887/jpbsi.v15i3.102049>
- Endang Purnawati, Sapitri, N., Juairiah, S., Al Amin, N. W. M., & Syaputra, D. (2026). Contemporary political practice: Political communication from the perspective of concepts, theories, and strategies. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1946>
- Ernanda. (2025). Tinjauan komprehensif social actor network oleh Van Leeuwen (1996): Analisis eksklusif dan inklusi. *Linguistik Indonesia*, 43(1), 111–135. <https://doi.org/10.26499/li.v43i1.714>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Fowler, R. (1991). *Language in the news: Discourse and ideology in the press*. Routledge.
- Hajad, V., Yanda, S., Ikhsan, I., & Herizal, H. (2025). Food estate and governmentality: Kekuasaan negara dalam membentuk subjektivitas petani. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6372>
- Jakaria, J., Anggreini, H., & Harahap, M. (2025). Formasi dan negosiasi ideologi dalam novel *Arus Bawah* karya Emha Ainun Nadjib: Kajian hegemoni Gramsci. *IdeBahasa*, 7(1), 164–176. <https://doi.org/10.37296/idebahasa.v7i1.318>
- Juidah, I., & Pratiwi, V. U. (2025). CNN Indonesia's framing strategy in influencing public opinion. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2025.21607>
- Latifah, R. N., Mahirsah, M. K., Pranata, D. A. P., & Syukri, H. (2025). Representasi kekuasaan dalam teks Supersemar: Kajian analisis wacana kritis Ruth Wodak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3041–3050. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4004>
- Lestari, T. A., Fitri, H., Mustopa, R. A., & Rahmawati, H. (2025). Negosiasi ideologi dalam cerpen *Kurik* karya Hasan Al Banna: Kajian hegemoni Gramsci. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(4), 858–861. <https://doi.org/10.55681/nusra.v6i4.4145>
- Maulana, A. (2020). *Analisis wacana kritis wawancara politik di televisi: Studi kasus program ILC* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Miswari, A., Fanyra, J., & Saleh, M. (2026). Peran sistem pers Indonesia dalam peliputan bencana Aceh: Analisis kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–15.
- Ngatma'in, N. I., & Sohnui, S. (2026). Representasi wacana oposisi dalam media online Indonesia: Analisis linguistik kritis Roger Fowler. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 138–160.
- Octaviana, S. (2025). Antara solidaritas dan komodifikasi: Analisis wacana kritis terhadap narasi THR untuk ojol di media massa online. *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 48(2). <https://doi.org/10.7454/jmui.v48i2.1099>
- Pasah, M., Raharjo, A. S., Almagfira, A., Syahir, F. H., Asmara, D. A., Carina, J. C. C. T.,

- Carolina, L. L., Adfari, T. R., Abdullah, N. P., Yadila, N., & Amelia, S. P. (2025). *Mata Najwa sebagai cermin demokrasi dan representasi kebenaran dalam media alternatif. Jurnal*, 3(2).
- Putri, D. S., & Chasana, R. R. B. (2025). Aksi kawal putusan MK dalam bingkai media: Dominasi konflik dan tantangan demokrasi. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 14(1). <https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7467>
- Putri, R. (2025). Demokrasi dalam krisis partisipasi: Perlukah membangun pendidikan kebijakan publik dan hukum untuk generasi muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v13i1.292>
- Putra, M. Z. E. (2026). Ideologi dalam wacana efisiensi beasiswa KIP-Kuliah 2025 Kompas.com: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.60155/jbs.v13i1.674>
- Rahmi, L., & Yusuf, M. (2024). Kekuasaan dan bahasa dalam dialog politik tokoh publik di media massa: Kajian wacana kritis Fairclough. *Bahasa, Sastra, dan Media*, 6(2), 10–24.
- Rohmatulloh, M. T., & Setiawati, E. (2025). Kuasa dan wacana: Mengurai ideologi politik pemberitaan tentang “peringatan darurat” pada Detiknetwork. *Bahasa dan Sastra*, 7(1). <https://doi.org/10.26499/bahasa.v7i1.1229>
- Rosita, S., & Setiawan, A. (2024). Analisis wacana kritis video Instagram objek wisata Kebumen melalui perspektif Fairclough. *Jurnal Komunikasi Pariwisata Digital*, 5(1), 33–47.
- Sakina, I., & Hendrik, D. (2025). The development of Indonesian mass media: An analysis of political power and its influence on democracy. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 11(1), 96–106. <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.66957>
- Suardi, S. (2025). Meningkatkan kredibilitas media di Indonesia dalam era disrupsi informasi: Strategi menghadapi misinformasi digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.52423/jikuho.v10i1.1488>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, & Salamah. (2025). Bahasa sebagai alat hegemoni: Studi literatur tentang wacana media. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 8–16.
- Sukrin, S., & Muhlisina, S. (2025). Bahasa sebagai alat kekuasaan: Telaah kontekstual dalam analisis wacana kritis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(2), 471–482. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i2.5855>
- Tasrif, T. (2025). Konfigurasi dinamika komunikasi digital dalam ranah politik lokal: Taktik media sosial pada arena elektoral Pilkada Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(3), 435–442. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.709>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. In C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (Eds.), *Texts and practices: Readings in critical discourse analysis* (pp. 32–70). Routledge.
- Widodo, D., & Fitriani, S. (2025). Peran media dalam membangun kekuasaan: Analisis wacana kritis terhadap wawancara presiden di talk show politik. *Jurnal Media dan Kekuasaan*, 7(2), 23–39.
- Wijaya, A. (2022). *Strategi kekuasaan dalam acara bincang-bincang Mata Najwa: Analisis wacana kritis* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yopie A. T. Pangemanan. (2025). Donald Trump’s political and rhetorical strategies in the 2024 United States presidential campaign debate: A critical discourse and populist rhetoric analysis. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 9(3), 830–841. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i3.5477>